

PERANAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Rini Permatasari, S.AP¹,
Antri Mariza Qadarsih, S.Sos., M.Si², Hengki Pernanda, S.T., M.Si³
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

rinipermatasari92@gmail.com

tei.qadarsih@gmail.com

h3ngk1@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of the Role of Women in Public Position in Kerinci District. This study takes place in the district of Kerinci with the formulation of the problem How the Role of Women in Public Position in the administrative area of Kerinci Regency The purpose of this study is to analyze the role of women in public governance in the district of Kerinci. This study uses qualitative while the data obtained through interviews in Kerinci Regency for 8 informants who then do data analysis with data triangulation so that accurate information can be obtained. The conclusion of this study is that the role of women in the Kerinci Regency asked for help with their assignments well. The role of women has been very active in the activities of each of the existing fields. The role of women can also provide motivation to work well, so that subordinates can receive well too.

Key word : The Role of Women, Public Position

ABSTRAK

Analisis Peranan Perempuan dalam Jabatan Publik di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kerinci dengan rumusan masalah Bagaimana Peranan Perempuan Dalam Jabatan Publik di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Kerinci Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Peranan Perempuan Dalam Jabatan Publik di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara di Kabupaten Kerinci kepada 8 orang informan yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi data sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Peranan Perempuan di Kabupaten Kerinci dinilai mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Peranan perempuan sudah sangat berperan aktif dalam kegiatan organisasi di masing-masing bidang yang ada. Peranan perempuan juga dapat memberikan motivasi kerja kepada bawahan dengan baik, sehingga bawahan bisa menerima dengan baik juga.

Kata kunci : Peranan Perempuan, Jabatan Publik

I. PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT (Zainuddin, 2005: 17).

Berkaitan dengan kepemimpinan, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin, Perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat mempengaruhi orang lain dengan argumentasi-argumentasi ilmiah dan logis, Kalau hal tersebut dapat diraih perempuan, maka perempuan memiliki dua “senjata” yang sangat ampuh, yakni pertama perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, dan kedua argument kuat yang menyentuh nalar.

Dalam pandangan tradisional, perempuan diidentikkan dengan sosok yang lemah, halus dan emosional, Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah, berani dan rasional. Pandangan ini telah memposisikan perempuan sebagai makhluk yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki, perempuan sebagai kepala pemerintahan telah ada sejak abad ke-15, Kepemimpinan perempuan mulai bangkit dari tidur panjang sejak isu hak asasi manusia dan persamaan gender secara lantang di suarakan oleh aktivis feminisme. Kiprah perempuan tersebut semakin menonjol pada abad ke-21 di berbagai negara, sebagian besar perempuan mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan atau mobilitas vertikal. Sudah banyak kaum perempuan yang dapat mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki sehingga dapat menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, saat ini kita dapat melihat kiprah kepemimpinan perempuan dalam berbagai peran dan posisi strategis dalam kehidupan masyarakat.

Kepemimpinan Perempuan Indonesia benar-benar muncul mengambil peranan strategis kepemimpinan dalam pemerintahan. Indonesia pernah mempercayakan kepemimpinan seorang presiden berjenis kelamin perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri, selain itu ada Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya dan Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu, lebih operasional ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 yaitu didalam butir tentang “Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa”, menggariskan bahwa :

Sekretariat kabupaten kerinci memiliki total jumlah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan public adalah sebanyak 632 orang, perbandingan komposisi perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan public antara lain jumlah pejabat laki-laki sebanyak 499 orang sedangkan jumlah pejabat perempuan sebanyak 133 orang dengan jabatan eselon III/a Sebanyak 4 orang, Eselon III/b sebanyak 8 orang, dan Eselon IV sebanyak 121, Selisih perbandingan antara pejabat laki-laki dengan pejabat perempuan sebanyak 366 orang, dalam hal ini pejabat perempuan masih sedikit yang menduduki jabatan pada Kantor Sekretariat kabupaten kerinci.

Adapun terdapat fenomena yang terjadi di lapangan atau di Kantor Sekretariat Kabupaten Kerinci yaitu :

1. Pada permasalahan nilai-nilai sosial yang terjadi pada Perempuan adanya pembatasan hak akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi.
2. Belum maksimal taraf pendidikan dalam meningkatkan sumber daya kaum perempuan dalam jabatan publik.
3. Terbatasnya kemampuan kaum perempuan dalam berkomunikasi terkait mengenai jabatan publik.
4. Kurangnya pengalaman kerja perempuan dalam jabatan publik di karenakan selama ini perempuan kurang di beri kesempatan dibanding pria dalam jabatan publik.

5. Status sosial akan tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang masih kaku di kalangan masyarakat dan adanya sekelompok masyarakat yang menganut paham patriarki.

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci”**.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah : “Bagaimanakah Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci?”

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam jabatan publik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, yaitu :

3.1 Secara teoritis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas khususnya di mengenai peranan Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kerinci, sehingga setelah menyelesaikan studi di sekolah tinggi ini, hasil dari penelitian ini dapat direalisasikan untuk praktiknya di lapangan.
2. Diharapkan penelitian ini sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mengenai peranan Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik Pada Kantor Sekretariat kabupaten kerinci.

3.2 Secara Akademik.

1. Sebagai bahan informasi dan memperkaya kepustakaan dan menjadi sumber bagi penelitian berikutnya.
2. Dapat menjadi masukan dan informasi bagi instansi yang penulis jadikan objek penelitian.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Peranan

Menurut Soekanto (2005:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan(status). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranannya, antara kedudukan dan peranan keduanya tidak dapat dipisahkan. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Tidak ada peranan tanpa adanya kedudukan, peranan juga mempunyai arti demikian. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1173). Peranan menurut Ambarwati (2009:15), menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu Organisasi.

Menurut Miftah Thoha (2005:10) peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Menurut Soleman B. Taneko (1994:37) peranan dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari satu status yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial. Norma-norma tersebut terintegrasi dan membentuk suatu peranan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang didalamnya melekat unsur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta fungsi seseorang atau kelompok didalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

4.2 Kepemimpinan.

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri. Riberu (2003:34)

Kepemimpinan adalah “suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk menunaikan suatu misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan koheren.” Mereka yang memegang jabatan sebagai pemimpin menerapkan seluruh atribut kepemimpinannya (keyakinan, nilai-nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan ketrampilan). (Kartono : 1998:23). Jadi seorang pemimpin berbeda dari majikan, dan berbeda dari manajer. Seorang pemimpin menjadikan orang-orang ingin mencapai tujuan dan sasaran yang tinggi, sedangkan seorang majikan menyuruh orang-orang untuk menunaikan suatu tugas atau mencapai tujuan. Seorang pemimpin melakukan hal-hal yang benar, sedangkan seorang manajer melakukan hal-hal dengan benar (*Leaders do right things, managers do everything right*). Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin.

Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. (Tarmodjo dan Harmanti : 1994: 237)

Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik individu maupun masyarakat.

4.3 Perempuan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1998:107) Perempuan berarti “Perempuan Dewasa”. Dan berdasarkan “*Old Javanese English Dictionary*” kata Perempuan berarti yang diinginkan. Dengan maksud bahwa Perempuan adalah sesuatu yang diinginkan pria. Perempuan baru bisa diperhitungkan jika dan bila ia bisa dimanfaatkan oleh pria. Dengan demikian, bahwa Perempuan hanya menjadi objek bagi laki-laki.

Bila Perempuan ditinjau dari karakteristiknya, banyak gagasan tradisional dan stereotip yang merendahkan martabat kaum Perempuan. Kaum stereotip cenderung mempertahankan gagasan bahwa Perempuan kurang memiliki kemampuan, bodoh dan acuh tak acuh terhadap lingkungan mereka. Dengan asumsi bahwa banyak Perempuan yang bingung, bodoh, tidak pernah mengeluarkan pendapat, ketakutan, pasif, tidak dapat mengambil keputusan, tidak berpengetahuan, tidak bergairah, hanya tertarik pada mode dan kosmetika, lemah, cengeng, tidak menepati waktu, tidak berani, tidak mandiri, percaya pada tahayul dan tidak bermotivasi.

Disisi lain Nature Theory menyatakan bahwa secara alamiah Perempuan mempunyai kodrat yang lemah lembut, telaten, penuh kasih, sensitif, dan cenderung dekat secara psikologis dengan anak, (Arif Budiman, 1995:11). Sewajarnya jika Perempuan hidup dalam lingkungan rumah tangga, dibanding pria tugas ini adalah tugas yang dibebankan kepada mereka yakni melahirkan dan membesarkan anak dalam lingkungan rumah tangganya. Sementara laki-laki mempunyai tugas lain yakni pergi keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

4.4 Peran Kepemimpinan Perempuan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai “peran Kepemimpinan Perempuan” maka yang dimaksud dengan “peran Kepemimpinan Perempuan” dalam penelitian ini adalah “manusia yang bersikap halus melakukan serangkaian perilaku yang menduduki posisi tertentu baik dalam organisasi maupun dalam kelompok”. Di Indonesia pencantuman peranan perempuan dalam pembangunan bangsa mulai pada GBN tahun 1978 sampai sekarang, yang mengamanatkan bahwa perempuan mempunyai kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun sampai saat ini partisipasi perempuan belum berjalan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bahkan cenderung menempati posisi terbelakang (Tjoharminoto, 1996 : 26).

Ada berbagai pendapat berkembang ditengah-tengah masyarakat mengenai peran Perempuan. Adapun persepsi masyarakat umum mengenai peran Perempuan dalam sektor domestik dan sektor publik adalah sebagai berikut :

4.4.1 Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sektor Domestik.

Dalam sektor domestik, kehadiran Perempuan baik dari Segi Pembagian kerja maupun melaksanakan peran, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosiologi mengalami marginalisasi, karena wilayah domestik adalah wilayah pribadi. Dalam wilayah ini Perempuan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan karir atau mencari nafkah diluar rumah. Kebanyakan Perempuan mengetahui bahwa masyarakat mengharapkan mereka menjadi istri dan ibu. Peran umum ini dipertahankan oleh banyak orang tua-tua dan berpegang teguh pada tradisi yang mereka pertahankan bahwa menjadi ibu yang baik membutuhkan seluruh tenaga seorang Perempuan.

Seperti digambarkan dalam konsep peperangan yang menjadikan suatu kekuatan pria dengan sikap rela berkorban, dimana Perempuan berada pada barisan yang paling belakang bahkan sebagai lambang yang dipertaruhkan yang akhirnya maju berperang membela tanah air dan keluarga yang mencakup istri dan anak.

Dari konsep diatas dapat kita pahami bahwa Perempuan tidak hanya diperhitungkan dalam hal merancang, membuat dan bahkan merumuskan suatu keputusan dalam rumah tangga. Pria secara tidak langsung menempatkan Perempuan hanya pada posisi sebagai pelaksana kebijakan yang mengikuti aturan baku yang ditetapkan oleh kaum pria.

Didalam masyarakat heterogen prinsip peperangan inilah yang masih melekat dan dipegang teguh sampai saat ini.

4.4.2 Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sektor Publik

Dalam kenyataannya tidak mudah bagi Perempuan untuk memasuki sector publik karena selama ini masyarakat menganggap bahwa Perempuan hanya cocok berkecimpung disektor domestik. Jika kaum Perempuan bekerja diluar rumah dan mereka berkeluarga, maka mereka diharapkan mempertahankan citra Perempuan sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya.

Keterlihatan Perempuan disektor publik membawa dampak terhadap peranan Perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Disatu pihak, Perempuan bekerja dapat berperan membantu ekonomi keluarga, disisi lain perannya dalam urusan rumah tangga (domestik) menjadi berkurang karena lamanya waktu yang digunakan untuk beraktivitas diluar rumah (publik).

Oleh karena citra Perempuan Indonesia masa kini tentunya tidak sama lagi dengan citra Perempuan masa lalu, maka Perempuan masa kini tidak merupakan objek yang hanya diwajibkan untuk setia, tunduk, patuh pada suami serta semata-matamengurus dapur. Dewasa ini Perempuan memperoleh kesempatan untuk berperan lebih majemuk. Perempuan merupakan anggota masyarakat yang semakin tampil keberadaannya dengan peran yang

semakin kokoh. Menurut Daud Juesoef dalam Satu Abad Kartini, besar kecilnya kemampuan seseorang, menentukan secara langsung derajat kebebasannya.

4.4.3 Jabatan Publik

Kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, Wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka suatu satuan organisasi yang disebut jabatan, Salah satu yang paling menarik dalam substansi UU ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014) adalah berkenaan dengan pangkat dan jabatan ASN.

Menurut Soyandi (2008) jabatan publik adalah suatu proses yang sistematis untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan yang meliputi tugastugas, pekerjaan, kewenangan dan kondisi kerja, dan mengenai syarat-syarat kualifikasi yang ditentukan seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang dapat menjalankan tugas dalam suatu jabatan dengan baik.

Menurut Garry Dessler (1998:85) jabatan adalah prosedur untuk menentukan tugas-tugas dan hakikat pekerjaan serta jenis orang (berkaitan dengan keterampilan dan pengalaman) yang perlu untuk dilaksanakannya. Sedangkan menurut Nurmansyah (2000:29) jabatan adalah tahap pertama dalam penyusunan organisasi, dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi yang menciptakan banyak pekerjaan.

Jabatan dalam rangka satu satuan organisasi berfungsi menciptakan, menafsirkan dan memperkuat tata tertib yang mengikat anggota-anggota dalam sistem politik disebut dengan jabatan. Kumpulan jabatan dalam suatu sistem politik membentuk pemerintahan dari sistem itu, pemerintah berperan menetapkan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat atau Negara.

Jabatan publik adalah jabatan yang diduduki seseorang sebagai pejabat pemerintah. Dalam penelitian ini menekankan pada jabatan struktural yang secara khusus penempatan Perempuan kedalam Eselonisasi Dan Eselonisasi terkait dengan besarnya tugas dan wewenang dari jabatan yang akan diduduki oleh pejabat yang bersangkutan, (Miftah Thoha, 2005:60).

Jabatan struktural menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur, serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Karena adanya keterbatasan dalam strategi sebelumnya maka muncul Gender and Development yang memfokuskan pada relasi gender dengan memperjuangkan posisi kaum Perempuan tidak hanya dalam kebutuhan statis saja tetapi juga dalam kebutuhan strategis. Strategis yang paling mutakhir adalah Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender, sebagai strategi alternative dari strategi sebelumnya dengan maksud percepatan terciptanya suatu keadilan gender dimasyarakat dengan menggunakan sarana advokasi, studi dan perencanaan kebijakan. Strategi ini justru menargetkan pada organisasi dan institusi. Dengan strategi-strategi tersebut, saat ini Perempuan yang menduduki jabatan strategis dalam pembangunan yang berada dalam posisi jabatan publik sudah semakin meningkat.

4.4.4 Peran Perempuan Sebagai Pejabat Publik

Menurut Mansur Fakih (1999:109) peran serta Perempuan bukan hanya sekedar partisipasi, namun lebih jauh lagi Perempuan dituntut untuk mampu bergerak dalam tatanan konseptual.

Perempuan sebagai pejabat publik harus bisa melihat bagaimana peran mereka didalam pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan secara sungguh-sungguh tanpa ada tekanan dari pihak manapun sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Tugas dan wewenang Perempuan sebagai pejabat publik adalah menjalankan semua aktivitas yang berhubungan dengan publik dan menerima laporan dari masyarakat mengenai tata cara system pemerintahan. Perempuan dituntut untuk bisa menjalankan semua urusan dan mengurus segala hal yang menyangkut masalah publik. Seorang pejabat publik dilingkungan pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa ia bisa melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya dan menjalankannya dengan baik sehingga orang menilai bahwa mereka ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan sesuai dengan keahliannya.

4.5 Iklim Untuk Menduduki Jabatan Publik di Era Otonomi

Standar kompetensi merupakan ukuran atas kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan berbagai kultur dan erat kaitannya dengan profesionalisme. Ini berarti, standar kompetensi merujuk pada sesuatu keadaan dimana seseorang dapat dipercaya berdasarkan kemampuannya. Bagi organisasi standar kompetensi merupakan suatu konsep keandalan dan suatu organisasi yang diperoleh melalui dunia profesi yang dimilikinya. Dengan demikian standar kompetensi menunjukkan kadar penguasaan suatu profesi atau bidang tanggungjawabnya.

Standar kompetensi mencakup 3 hal, yaitu :

1. Ketrampilan, yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit.
2. Pengetahuan, yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis.
3. Sikap yaitu kesan yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerja.

Secara spesifik kualifikasi ASN dalam menduduki jabatan publik dapat ditinjau dari tiga unsur, yaitu : Pertama, Keahlian, bahwa setiap ASN harus :

1. Memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki pengetahuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Memiliki wawasan yang luas.
4. Beretika. Kedua, Kemampuan teknis, yaitu ASN harus memahami tugastugas di bidangnya.

Ketiga, Sifat-sifat personil yang baik, antara lain harus memiliki disiplin tinggi, jujur. Menaruh minat, terbuka, obyektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan terlatih.

Sejalan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menduduki jabatan publik maka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menggunakan system manajemen gabungan dari unified system dan separated system.

Dengan adanya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN diharapkan pegawai ASN mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, kerja pegawai ASN tidak lagi berorientasi melayani atasnya, melainkan pelayanan publik yaitu sebagai abdi masyarakat Indonesia bahkan masyarakat internasional yang berkepentingan di Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, asal usul, aliran, politik, gender, dan status sosialnya, pegawai ASN harus mampu menjalankan revolusi mental secara benar, selalu memiliki komitmen dalam melayani masyarakat sehingga tercipta good governance.

4.6 Kerangka Pemikiran.

Variable pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2007:38). Adapun indikator yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Nilai – nilai Sosial adalah sebagai pengendali perilaku manusia.
2. Nilai social ini merupakan ukuran–ukuran didalam menilai tindakan dalam hubungannya dengan orang lain.
3. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karasnya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.
4. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
5. Pengalaman Ke rja pengetahuan menentukan kesuksesan seseorang dalam karir, yang dipengaruhi oleh bentuk dan jenis pekerjaan yang spesifik, sehingga mendorong seseorang mencapai penyelesaian yang sempurna dan lebih baik dibandingkan orang lain.

Status Sosial setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing – masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering juga disebut kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam masyarakatnya. Pada semua sistem sosial, tentu terdapat berbagaimacam kedudukan atau status, seperti anak, isteri, suami dan sebagainya.

Tabel 1.1
Kerangka pemikiran



Sumber : (Suugianto, 2007 ;38)

4.7 Metodologi Penelitian

4.7.1 Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009: 21)

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi dan aktivitas sosial. Satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

4.7.2 Metode Pengumpulan Data.

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara.

3. Wawancara .

Yaitu dengan melakukan dialog atau wawancara langsung dengan Nara Sumber untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan Penelitian.

4. Observasi.

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan.

4.7.3 Jenis Data

Untuk keperluan penelitian ini, adapun jenis data yang penulis gunakan adalah :

1. Data Primer.

yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian melalui wawancara agar data yang didapatkan tepat dan benar melalui pegawai di wilayah kabupaten kerinci.

2. Data Sekunder.

yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip-arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian dengan melihat relevansinya dengan permasalahan penelitian.

4.7.4 Informan Penelitian

Untuk pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*) yaitu memilih orang – orang yang dianggap mengetahui dan mampu menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian kualitatif tidak dipersiapkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu :

1. Prinsip Kesesuaian.

Informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik penelitian.

2. Jumlah Informan.

Jumlah informan sangat tergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah – masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari informan, maka jumlah tersebut adalah tepat.

3. Prinsip Kecukupan.

4. Informasi yang diperoleh dari informan sudah dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topic penelitian.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ASN yang ada di Kantor Sekretariat Kabupaten Kerinci.

4.7.5 Alat Pengumpulan Data

1. Pensil.

2. Pena.

3. Kertas .

4. Laptop

4.7.6 Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis datanya serta ditambah dengan keterangan yang mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai peranan Perempuan dalam jabatan publik dan data tersebut disajikan untuk mendukung dalam pengambilan kesimpulan.

Menurut Miles dalam Emzir (2010 : 129) analisa data ada tiga cara yaitu:

1. Reduksi data.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi harus melalui rangkuman atau parafrase.

2. Model data (data display).

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (display) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

Bentuk yang paling sering dimodel data kualitatif selama ini adalah *teks naratif*. Manusia tidak terlalu kuat sebagai pemroses dari sejumlah besar informasi; tendensi kognitif merupakan mereduksi informasi yang kompleks kedalam berbagai Gestalt yang dipilih atau konfigurasi-konfigurasi yang mudah dipahami. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan.

Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis :

1. Penarikan/Verifikasi kesimpulan.

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan yang berisikan kesimpulan.

2. Kesimpulan akhir tergantung pada kumpulan dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode.

Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara :

1. Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda.
2. Triangulasi data, dilakukan dengan cara.
3. Minta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.
4. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara.
5. Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam serta menelaah data sekunder.

4.7.7 Unit Analisis

Adapun unit yang akan diteliti dalam hal ini adalah peran Perempuan dalam jabatan publik di kabupaten kerinci meliputi Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci, Kesatuan Bangsa Dan Politik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BKPSDM, dinas lingkungan hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.7.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Sekretariat kabupaten kerinci. Untuk data Kepemimpinan perempuan diambil di di ambil di Kantor Sekretriati kabupaten kerinci yang terdiri dari pejabat eselon IV, III, dan II.

II. METODE PENELITIAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kerinci terletak di ujung paling barat Provinsi Jambi, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 kecamatan dan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Siulak. Wilayah Kerinci merupakan wilayah pegunungan yang terbentang dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya dan sebagian besarnya berada pada ketinggian 500 meter. Hal ini menjadikan suhu udara di wilayah Kerinci terasa sejuk.

Kabupaten Kerinci dikenal dengan julukan Sepenggal Tanah Surga Sakti Alam Kerinci yang mencerminkan berbagai potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Kerinci. Kerinci ditetapkan sebagai Kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pada tahun 2011, pusat pemerintahan berpindah ke Siulak. Kabupaten Kerinci mekar pada tahun 2008 menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil yaitu Kuringi, yang merupakan nama bunga yang tumbuh di daerah pegunungan india selatan.

Kerinci berada di ujung barat Provinsi Jambi dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Solok selatan provinsi Sumatra Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat, di Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 Kecamatan antara lain Air Hangat, Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, Batang Merangin, Bukit Kerman, Danau Kerinci, Depati Tujuh, Gunung Kerinci, Gunung Raya, Gunung Tujuh, Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Keliling Danau, Sitingau Laut, Siulak, dan Siulak Mukai.

Letak Geografis Kabupaten Kerinci

Keadaan geografis Kabupaten Kerinci dengan total luas wilayah 380.850 Ha, yang mana 50,37 % merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dengan luas lahan budidaya 49,63% atau 189.027,7 Ha yang manasalah satu fungsi dari TNKS sebagai daerah serapan air sangat menunjang kemajuan sector pertanian. dimana 85% penduduk hidup dari sector pertanian. Akan tetapi terdapat perbedaan kondisi geografis antara wilayah utara dan wilayah selatan.

Visi dan Misi Kabupaten Kerinci

2.2.1 Visi Kabupaten Kerinci

Adapun misi dari kabupaten kerinci adalah terwujudnya kerinci lebih baik dan berkeadilan.

2.2.2 Misi Kabupaten Kerinci.

1. Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar sector :
 1. Program Peningkatan Kualitas Jalan.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 3. Program Pengembangan Perumahan Layak Huni.
 4. Program Pengembangan Energi.
 5. Program Air Bersih.
 6. Program Pemekaran Daerah.
 7. Program Gerakan Membangun Kerinci dari Desa.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

1. Program Kesehatan Berkualitas.
2. Program KerinciCerdas.
3. Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
4. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
5. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
6. Program Peningkatan Peranserta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
8. Program Pemberdayaan Sosial.
9. Program Penyediaan Lapangan Pekerjaan.
10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
12. Program Pengembangan.
13. Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Daerah berbasis Pertanian, Industri dan Pariwisata.
 1. Program Pengalihan dan Peningkatan Sumber Sumber Pendapatan Daerah.
 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 5. Program Produksi Pertanian.
 6. Program Pengembangan Pariwisata.
 7. Program Pelestarian Budaya.
 8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.
 10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
 11. Program Peningkatan Investasi Daerah.
 12. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan.
4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Komoditi berbasis Tata Ruang.
 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
 7. Program Pemanfaatan Ruang.
 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 9. Program Pengembangan Komoditi Lokal.
 10. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
 11. Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana.
 12. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

1. Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.

2.3. Bupati Kabupaten Kerinci

Semenjak pertama kali dimekarkan pada tanggal 10 November 1958, Kabupaten Kerinci Hingga saat ini telah di pimpin oleh 19 orang Bupati, baik secara definitive maupun pelaksana tugas.

Siapa saja Bupati Kerinci pertama hingga saat ini, dapat dilihat pada table berikut daftarnya :

Tabel 2.1.
Nama Bupati Kerinci

No	Nama	Lama Menjabat		Keterangan
		Mulai	Sampai	
1	Mohd. Noeh	1958	1960	Pejabat
2	Yusuf Nasri	1960	1964	Bupati
3	H. Ali Hamzah	1964	1964	Pejabat
4	Drs. Z. Mukhtar Daeng Maguna	1964	1965	Pejabat
5	Yusuf Rusdi (Letkol)	1965	1966	Pejabat
6	SyamsuBahrin	1966	1968	Pejabat
7	M. Koekoeh (Kolonel)	1968	1969	Bupati
8	M.A.A.DT. Majo Indo	1969	1969	Bupati
9	Drs. Ahmad Daud	1969	1972	Bupati
10	Rusdi Sayuti, BA	1972	1977	Bupati
11	Jamaludin Tambunan, SH	1977	1978	Pejabat
12	Nazar Efendi (Letkol)	1978	1983	Bupati
13	Drs. H.Mohd. Awal	1983	1988	Bupati
14	Drs. Hasmi Mukhtar	1988	1993	Bupati
15	H. Bambang Sukowinarno (Kol)	1993	1998	Bupati
16	H.A. JazidIdris, SH	1998	1999	PelaksanaTugas
17	H. Fauzi Siin (Letkol Czi Purn.)	1999	2009	Bupati
18	H. Murasman	2009	2014	Bupati
19	DR. H. Adirozal. M.Si	2014	Sekarang	Bupati

2.4. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melaksanakan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil unsur yang berkedudukan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, danmerata. Pegawai Negeri Sipil harus bersifat netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sebuah organisasi potensi Sumber Daya Manusia bias dikatakan sebagai sumber daya utama karna dapat mengolah, menganalisis, dan mengerakan tujuan instansi secara efektif dan efisien. Peran manusia dalam instansi sebagai pegawai merupakan factor penting dalam setiap instansi karna pegawai yang menjadi penggerak dan penentu jalan nya

organisasi, Setia porganisasi baik organisasi perusahaan, organisasi social maupun organisasi pemerintah mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut dan yang paling berperan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah Sumber Daya Manusia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Data

Semenjak isu hak asasi manusia dan persamaan gender di suarakan oleh aktivis feminisme. Pengaruh serta keterlibatan perempuan tersebut semakin terlihat pada abad ke-21. Di berbagai Negara yang ada di dunia, sebagian besar perempuan mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan. Sudah banyak kaum perempuan yang dapat mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki sehingga dapat menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Pengumpulan data mulai dilaksanakan pada Bulan Juli 2020 dengan melakukan wawancara dan mengambil data yang diperlukan pada instansi pemerintah Kabupaten Kerinci, dimana total jumlah keseluruhan informan adalah sebanyak 8 orang.

Dalam penelitian ini ada lima indikator yang digunakan sebagai acuan untuk memperoleh data dilapangan yang dilakukan dengan wawancara bebas kepada informan yang ada pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kerinci dilokasi penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai berikut :

Indikator analisis kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik di Kabupaten Kerinci mengacu kepada pendapat (sugiono, 2007:38) adalah sebagai berikut :

Nilai-Nilai Sosial.

Berdasarkan Indikator yang mengacu kepada pendapat (Sugiyono, 2007:38) dalam hal Nilai-nilai sosial yang merupakan pengendalian perilaku dari manusia serta ukuran ukuran didalam menilai tindakan dalam hubungan dengan manusia lainnya ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial di BKPSDM Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

Mereka dapat memperhitungkan apa yang dilakukan orang lain. Akan Selalu mengalami perubahan, bersamaan dengan meningkatnya pengalaman baik yang di peroleh dari luar masyarakatnya”(Hasil wawancara dengan ibu Elfi Susanti tanggal 07 Juli 2020).

Pada nilai sosial peran perempuan untuk sekarang sudah baik dan dapat membawa perempuan-perempuan lain untuk ikut dalam bersosialisasi dalam masyarakat” (Hasil Wawancara dengan ibu Olra Nofratilova tanggal 07 Juli 2020).

Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

untuk zaman sekarang ini peran perempuan dalam hal nilai- nilai social sudah sangat baik, baik di mata masyarakat maupun pemerintahan ”(Hasil Wawancara dengan ibu Isranida tanggal 09 Juli 2020).

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

Untuk penempatan perempuan dalam jabatan public yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, maka penempatannya tetap harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat” (Hasil Wawancara dengan ibu Nila Kasuma, SE, MM tanggal 09 Juli 2020)

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut:

“Nilai sosial merupakan nilai yang dianut masyarakat yang dianggap baik atau buruk terhadap suatu hal. Perempuan dalam jabatan public merupakan suatu hal yang lumrah dan dianggap baik sejauh ini saya tidak melihat jabatan public yang bias dilaksanakan oleh kaum pria, yang tabu di lakukan oleh kaum perempuan.” (Hasil Wawancara dengan ibu Parlina S.Pi, M.Si tanggal 09 Juli 2020).

Pada Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian maju, perempuan masa kini dapat ikut berperan aktif dalam memiliki kebutuhan sosial hidup keluarganya dan perempuan tidaklah asing lagi untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dilingkungan tempat tinggalnya khususnya” (Hasil Wawancara dengan ibu Yasulika Lestari tanggal 10 Juli 2020).

Pada Badan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

Demokrasi yang mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki laki dan perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan public terutama dalam pengambilan keputusan kalau di lihat pada saat ini peranan perempuan dalam jabatan public sangat membantu dalam hal pemutusan keputusan suatu masalah” (Hasil Wawancara dengan ibu Nirmala Putri tanggal 10 Juli 2020)

Pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Perempuan bisa menciptakan suatu pemerintahan di dalam masyarakat sehingga dapat mengembangkan kualitas diri untuk menjadi perempuan yang lebih baik” (Hasil Wawancara dengan ibu Isramida, SH tanggal 13 Juli 2020)

Dari hasil jawaban informan dapat di tarik kesimpulan bahwa, peranan perempuan dalam jabatan publik mengenai nilai-nilai sosial sudah sangat baik dan berperan. Peranan perempuan terhadap nilai sosial pada jabatan publik sudah menjadi hal biasa di kalangan pemerintahan maupun masyarakat, dizaman demokrasi ini kesetaraan derajat di wilayah pemerintahan sudah baik begitupun dengan nilai sosial yang ada.

Pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu yang di butuhkan oleh setiap manusia untuk menciptakan sumber daya yang berilmu dan berdaya guna, selain itu pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusiawi baik potensi cipta, fisik maupun karsanya agar potensi itu menjadi nyata dan berfungsi dalam perjalanan hidupnya.

Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial di BKPSDM Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Peran Pendidikan dalam jabatan public sangat penting guna untuk mengeluarkan potensi yang ada terutama pada pengambilan keputusan bagi pemegang jabatan, untuk era modern sekarang ini pendidikan untuk perempuan rata-rata sudah ada di jenjang Strata I bahkan lebih.” (Hasil wawancara dengan ibu Elfi susanti tanggal 07 Juli 2020)

“Suatu yang lumrah untuk jaman sekarang dalam hal pendidikan karna rata-rata baik kaum perempuan maupun laki-laki sudah menempuh pendidikan Serendah- rendahnya D3 apalagi dalam suatu jabatan pendidikan sangat di perlukan bagi ASN karna berguna untuk kenaikan pangkat dan jabatan ” (Hasil Wawancara dengan ibu Olra nofratilova tanggal 07 Juli 2020)

Pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal pendidikan perempuan bisa menyamakan dengan laki-laki, Pendidikan sangat penting terutama bagi ASN selain itu perempuan juga punya peluang yang sama dengan laki-laki dalam menduduki jabatan publik ”(Hasil Wawancara dengan ibu Isranida tanggal 09 Juli 2020)

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal pendidikan peran perempuan justru lebih menonjol hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang menjadi guru, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA”(Hasil Wawancara dengan ibu Nila Kasuma, SE, MM tanggal 09 Juli 2020)

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut:

“Pendidikan merupakan salah satu penunjang untuk seseorang menduduki jabatan public, seharusnya semakin baik pendidikan seseorang semakin layak untuk menduduki jabatan public di pemerintahan.”(Hasil Wawancara dengan ibu Parlina S.Pi, M.Si tanggal 09 Juli 2020)

Pada Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Dengan adanya istilah emansipasi wanita kini perempuan dengan hak dan kesempatan yang dimilikinya dapat merubah pola kehidupannya kearah yang lebih baik dan modern, perempuan sekarang dapat atau berhak memperoleh pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki sehingga kaum perempuan bias menjadi perdana menteri,presiden, pengusaha, guru , koter, pelaut, pilot sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.”(Hasil Wawancara dengan ibu Yasulika Lestari tanggal 10 Juli 2020)

Pada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau dilihat pada saat ini peranan perempuan dalam jabatan public dalam hal pendidikan tidak ada masalah karna pemerintah sudah membolehkan/tidak ada larangan untuk perempuan menimba ilmu sampai sekolah tinggi selama dan selagi dia mau.”(Hasil Wawancara dengan ibu Nirmala Putri tanggal 10 Juli 2020)

Pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancarai dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Perempuan akan lebih baik serta kemampuan berfikirnya akan lebih jika pendidikan di dunia kerja dilaksanakan berdasarkan ilmu yang dimiliki ”(Hasil Wawancara dengan ibu Isramida, SH tanggal 13 Juli 2020)

Dari Jawaban informan dapat diambil kesimpulan bahwa, peranan perempuan dalam jabatan public dalam hal pendidikan cukup baik dan tidak ada masalah karna tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk tidak menimba ilmu sampai ke jenjang sekolah tinggi, dalam jabatan public rata-rata perempuan sudah berpendidikan dan memiliki pola pikir yang maju dan membangun.

Status Sosial

Status sosial setiap individu dalam masyarakat pastilah berbeda beda namu status sosial merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah

lakunya. Status sosial sering juga di sebut kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam masyarakat.

Ketika peneliti mewawancara dengan informan mengenai nilai-nilai sosial di BKPSDM Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

Tanpa kita sadari bahwa “setiap manusia baik perempuan maupun laki-laki ingin berstatus sosial seperti yang di jelaskan agar dapat meningkatkan derajat kehidupannya”(Hasil wawancara dengan ibu Elfi Susanti tanggal 07 Juli 2020).

“Jika salah seorang manusia mendalami suatu disiplin ilmu biasanya telah tertanam di mindsetnya bahwa ilmu dan pendidikan sersebut di gunakan untuk mendapatkan pekerjaan guna untuk meningkatkan status sosialnya” (Hasil Wawancara dengan ibu Olra Nofratilova tanggal 07 Juli 2020)

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancara dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

Terkadang di dalam suatu “perkumpulan atau lingkungan perempuan di tuntut untuk memegang sebuah jabatan publik untu menyetarakan status sosialnya” (Hasil Wawancara dengan ibuk Isranida tanggal 09 Juli 2020).

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancara dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Status Sosial terkadang sering menjadi kendala dalam menempatkan perempuan dalam jabatan tertentu , apalagi jika status sosial perempuan seorang janda atau belum menikah, akan lebih baik di tempatkan pada jabatan yang bekerja pada waktu pagi hingga pada sore saja dan harus dihindari bekerja pada malam hari” (Hasil Wawancara dengan ibu Nila Kasuma, SE, MM tanggal 09 Juli 2020)

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancara dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut:

“Status sosial merupakan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi tidak ada hubungan antara peran perempuan yang memegang jabatan publik dengan status sosial dalam masyarakat.” (Hasil Wawancara dengan ibu Parlina S.Pi, M.Si tanggal 10 Juli 2020)

Pada Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancara dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Perempuan dapat juga meningkatkan derajat, sehingga tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga saja akan tetapi juga bias tampil dimata masyarakat luas dengan cara berkepentingankeikutsertaan dalam kegiatan social ”(Hasil Wawancara dengan ibuk Yasulika Lestari tanggal 10 Juli 2020)

Pada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancara dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam dunia pekerjaan setiap staf diberikan kebebasan dalam berkarir demi menuju tercapainya visi dan misi dari suatu instansi pemerintahan, tidak dapat di pungkiri bahwa perempuan mendapat jabatan publik bukan semata-mata dikarenakan status sosial saja” (Hasil Wawancara dengan ibu Nirmala Putri tanggal 10 Juli 2020)

Pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Kerinci Ketika peneliti mewawancara dengan informan mengenai nilai-nilai sosial, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

“Status Sosialnya akan berubah, dari staf yang awalnya tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan, setelah memiliki jabatan akan berubah untuk bias

memutuskan suatu kebijakan ”(Hasil Wawancara dengan ibu Isramida, SH tanggal 13 Juli 2020).

Dari hasil jawaban informan dapat di tarik kesimpulan bahwa, peranan perempuan dalam jabatan publik dalam hal Status sosial tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan publik dan dengan penduduki jabatan publik seorang perempuan dapat lebih di pandang di kalangan masyarakat ataupun instansi tempat mereka bekerja selain itu status sosialnya juga akan lebih baik dari sebelum mereka memegang jabatan publik, status social juga berpengaruh terhadap interaksi yang baik antara perempuan maupun laki-laki.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan

1. Nilai-Nilai Sosial

Pada indikator ini peranan Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dalam hal pendidikan sudah sangat baik dan berperan. Peranan perempuan terhadap nilai sosial pada jabatan publik sudah menjadi hal biasa di kalangan pemerintahan maupun masyarakat, di zaman demokrasi ini kesetaraan derajat di kantor sekretariat sudah baik begitupun dengan nilai sosial yang ada.

2. Pendidikan

Pada indikator ini peranan Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dalam hal pendidikan sudah pendidikan cukup baik dan tidak ada masalah karna tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk tidak menimba ilmu sampai ke jenjang sekolah tinggi, dalam jabatan public rata-rata perempuan sudah berpendidikan dan memiliki pola pikir yang maju dan membangun.

3. Status Sosial

Pada indikator ini peranan perempuan dalam jabatan publik dalam hal status Status sosial tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan publik dan dengan penduduki jabatan publik seorang perempuan dapat lebih di pandang di kalangan masyarakat ataupun instansi tempat mereka bekerja selain itu status sosialnya juga akan lebih baik dari sebelum mereka memegang jabatan publik, status sosial juga berpengaruh terhadap interaksi yang baik antara perempuan maupun laki-laki.

Saran

1. Nilai – Nilai Sosial

Pada indikator ini diharapkan lebih ditingkatkan lagi peranan perempuan dalam hal nilai – nilai sosial. Peranan perempuan ini harus lebih terlihat lagi kepribadian sebagai pemimpin yang bekerja keras, beribawa dan bertanggung jawab.

2. Pendidikan

Pada indikator ini diharapkan agar lebih ditingkatkan lagi peranan perempuan dalam hal pendidikan. Peranan perempuan ini harus lebih cukup tinggi lagi memiliki pengetahuan dan informasi lebih baik dan lebih memahami makna kehidupan politik sehingga lebih cenderung terlibat dalam jabatan publik.

3. Status Sosial

Pada indikator ini diharapkan agar lebih ditingkatkan lagi peranan perempuan dalam hal status sosial. Peranan perempuan ini harus lebih terlihat lagi bahwasannya status sosial sangat berpengaruh terhadap interaksi yang terjadi baik itu pria dan perempuan yang selalu ingi berstatus sosial agar dapat meningkatkan derajat kehidupannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. *rahmatan lil alamin*.

Berkat taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan Program Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA – NUSA) Sungai Penuh pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu mendo’akan dan memberi semangat yang tiada tara dalam menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA – NUSA) Sungai Penuh.
2. Bapak Murlinus, S.H., M.H selaku Ketua STIA-NUSA Sungai Penuh.
3. Ibu Antri Mariza Qadarsih, S.Sos., M.Si dan Bapak Hengki Pernanda, S.T., M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga tersusunnya skripsi ini, semoga pengetahuan dan ilmu yang diberikan selama ini bermanfaat dan berkah.
4. Bapak Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai Penuh.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pembelajaran yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA – NUSA) Sungai Penuh.
6. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA – NUSA) Sungai Penuh yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan yang telah sabar dalam melayani penulis dalam mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penulisan skripsi.
8. Suami Muhammad Amin, S.Sy dan Anak Faqih Luthfi Al-Amin yang tercahay pelita hati penerang jiwa, takkan pernah lupa semua pengerbonan dan jerih payah yg engkau berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta do’a yang kau lantunkan untukku sehingga kudapat raih kesuksesan ini. Asaku kelak dapat membahagiakan dirimu sampai akhir hayatmu.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Dan semua pihak yang telah ikut membantu penulis baik berupa moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terwujud.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Budiman. 1995. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Eko, Bambang S. 2005. *Wanita, Martabat, dan Pembangunan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Endah, Nurdiana. 2002. *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. RAN PKTP : Kemitraan Negara dan Masyarakat.
- Garry, Dessler. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Terjemahan Benyamin*. Jakarta : Prehalindo.
- Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Mansur, Fakhri. 1999. Gender dan Perubahan Organisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moeliono. 1990. Sosiologi Wanita. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Nurmansyah. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Pertama. Pekanbaru : Unilak Pers.
- Pasiak, Taufik, Revolusi IQ/EQ/SQ Antara Nevrosin dan Al-Quran Cet.V ; Bandung : PT Mizan Pustaka 2005.
- Siagian, Sondang. 2005. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3ES.
- Situmorang. 1980. Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik. Jakarta : Suara Pembaharuan.
- Soedjito, Sosrodihardjo. 1986. Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soekanto, Soejono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : UI press.
- Soekidjo, Notoatmodjo. 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia Cetakan Keenam. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soleman, Taneko B. 1994. Sistem Sosial Indonesia Edisi Kedua. Jakarta : CV Fajar Agung.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2007 : 38. Kerangka Pemikiran
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi I Jakarta : Balai Pustaka dan Depdikbud.
- Thoha, Miftah. 2001. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali Pers.
- Thoha- 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta : Prenada Media.
- Veithzal, Rivai. 2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Zulfina, Adriani. 2009. Konsep Teori Gender dan Konsep Teori Keadilan dan Keadilan Gender. Merangin : Pusat Penelitian Gender.
- Ety, Yuniarti. 2005. Konsep dan Teori Gender, Makalah Dipresentasikan Pada Seminar Wanita. Padang : Desember 2005.
- Tasriani. 2009. Hak-Hak Perempuan Dalam Konteks Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Pekanbaru : Mei 2019
- Peraturan Perundang-Undangan : Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2014 ASN (Aparatur Sipil Negara) tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
- Puspitawati, H. 2012, Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia. PT. IPB Press Bogor
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000-2004.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.